# **DAFTAR PUSTAKA**

# **Buku**

Zelfi, Yoyon M Darusman, Oksidelfa Yanto (2016) Pembatalan Kewenangan Pencabutan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Atas Perubahan Kedua Tentang Pemerintahan Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xiv/2016”)

Redi, A., & Chandranegara, I. S. (2020). Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem PerUndang-Undangan Nasional. PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 144.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004 hal. 101

Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, hlm 155

Rahardjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung. CV Mandar Maju.

Redi, Ahmad dan Ibnu Sina Chandranegara.2020. Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional. Depok. Rajawali Pers. Depok.

Suteki. 2013. Desain Hukum di Ruang Sosial. Yogyakarta. Thafa Media.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. “Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)”. Depok. Rajawali Pers.

Watson, Alan. 1974. Legal Transplant: An Approach to Comparative Law. University of Georgia Press

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

# **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan PerUndang-Undangan.

# **Jurnal**

May Linda Iswaningsih, I. N. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA LOKAL DALAM. Jurnal Preferensi Hukum, 479.

Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1), 14–25.

Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha ,Vol. 6 No. 2; Agustus 2020

Fathorrahman. (2021). PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI. HUKMY : Jurnal Hukum, Volume 1, No. 2, Oktober, 133.

May Linda Iswaningsih, I. N. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA LOKAL DALAM. Jurnal Preferensi Hukum, 479.

Rishan, I. (Volume 18, Nomor 1, Maret 2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 1.

Simarmata, J. (Vol. 14 No. 01 - Maret 2017). PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SECARA FORMIL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: APAKAH KENISCAYAAN? (PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-VII/2009). Jurnal Legalisasi Indonesia, 39 - 48.

# **Website**

Fitri, W., & Hidayah, L. (2021). Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan PerUndang-Undangan. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 725–735.Paddock, R. C. 2020. Indonesia's Parliament Approves Jobs Bill, Despite Labor and Environmental Fears. New York Times. Diakses tanggal 1 April 2021.

Privacy Exchange.org, 2017, A global information resource on consumers,commerce, and data protection worldwide National Omnibus Laws, http://www.privacyexchange.org/legal/nat/omni/nol.html, diakses pada 7 Mei 2020.

Fitryantica A. Harmonisasi Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Gema. Keadilan; 2019

[Implikasi Hukum UNDANG-UNDANG Cipta Kerja Pasca Putusan MK - Serikat Petani Indonesia (spi.or.id)](https://spi.or.id/implikasi-hukum-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk/)